

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
(MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN)
TAHUN 2023



KELURAHAN PULUTAN
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
(MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN)
TAHUN 2023



KELURAHAN PULUTAN
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon oleh Pemerintah Daerah akan memberikan dampak buruk sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam Forum Konsultasi Publik dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan, sertapenyusunan kebijakan Pelayanan Publik.

Salatiga, 23 Agustus 2023

KURAH PULUTAN,

CHOMSATUN, SH
Penata Tk.I
NIP. 19720118 200604 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan dan Manfaat | 5 |
| C. Ruang Lingkup | 6 |
| BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN)..... | 9 |
| A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan | 9 |
| B. Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) | 9 |
| C. Metode Pelaksanaan | 11 |
| D. Susunan Acara | 12 |
| BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK..... | 13 |
| A. Identifikasi Masalah | 13 |
| B. Analisis | 13 |
| C. Rencana Aksi | 14 |
| Bab IV. PENUTUP | 15 |
| LAMPIRAN | 16 |
| 1. UNDANGAN..... | 17 |
| 2. DAFTAR HADIR..... | 18 |
| 3. NOTULEN..... | 22 |
| 4. BERITA ACARA..... | 26 |
| 5. DOKUMENTASI..... | 31 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “*Front Office*”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “*Back Office*” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai, karena, tugas yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan dari pegawai tersebut yang diterima oleh masyarakat.

Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai pada instansi pemerintah. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya sebagai masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu, akan menimbulkan kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik, ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain:

1. Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan.
2. Melakukan efisiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan.
3. Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah (prinsip rasionalisasi)
4. Pelayanan publik yang baik harus bisa mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Mencermati pandangan ini, maka dalam konteks pelayanan publik dapat digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas publik menurut Sofian Effendi (1995), antara lain:

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini Irfan Islamy (1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu :

1. **Prinsip Aksestabilitas**, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)

2. **Prinsip Kontinuitas**, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. **Prinsip Teknikalitas**, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.
4. **Prinsip Profitabilitas**, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
5. **Prinsip Akuntabilitas**, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan, sebagai berikut :

1. **Kesederhanaan** : Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. **Kejelasan** :
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. **Kepastian Waktu** : Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. **Akurasi** : Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. **Keamanan** : Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. **Tanggung jawab** : Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. **Kelengkapan sarana dan prasarana** : Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. **Kemudahan Akses** : Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. **Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan** : Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. **Kenyamanan** : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Atas dasar keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mengakomodasi peran segenap komponen masyarakat juga sebagai media koordinasi, komunikasi dan konsultasi program pembangunan. Tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Tingkat RW selanjutnya meningkat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan proses pengambilan

keputusan secara partisipatif dalam menentukan kebijakan daerah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta.

Selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dibagi dalam 2 (dua) Kegiatan yakni:

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dasar hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga adalah

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
2. **Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004**, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008**, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018**, tentang Kecamatan.
5. **Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017**, tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. **Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018**, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga adalah:

1. Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dengan seluruh pemangku kepentingan di Wilayah Kelurahan Pulutan.
2. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan, guna mendukung terwujudnya program program pemerintah, khususnya di wilayah Kelurahan Pulutan

3. Menampung dan menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Kelurahan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Manfaat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga adalah:

1. Menciptakan keselarasan usulan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan terhadap prioritas daerah.
2. Mempermudah kecamatan dalam mengajukan usulan kegiatan di Musrenbang Tingkat Kota.
3. Menjadi sarana untuk memfasilitasi perencanaan bottom up (partisipatif), top down (teknokratik).
4. Mempermudah OPD dalam melakukan verifikasi dan mengoreksi usulan yang masuk.
5. Menghindari terjadinya duplikasi usulan pada lokasi yang sama melalui pemetaan usulan.
6. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas proses usulan pembangunan.
7. Kemudahan dalam melakukan tracking terhadap setiap usulan yang masuk pada setiap tahapan.

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 maka ruang lingkup pembahasan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah :

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi jaringan air minum; drainase dan selokan; sarana pengumpulan dan pengolahan sampah; sumur resapan; jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; alat pemadam api ringan; pompa kebakaran portabel; penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi jalan pemukiman; jalan poros Kelurahan; dan/atau sarana prasarana transportasi lainnya.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau sarana prasarana kesehatan lainnya.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi taman bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; keluarga berencana; pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja; penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penyelenggaraan pelatihan usaha; pelatihan *start up* digital

- pemasaran produk usaha; dan/atau kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna) meliputi pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna); dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya, termasuk pemberian bantuan administrasi dan insentif.
 - e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi penyediaan layanan informasi tentang bencana; pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan atau secara teknis dikuasai oleh masyarakat.
- Secara sosial diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat serta norma agama.
- Secara ekonomi, layak atau dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat dengan hasil yang optimal.

BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo dilaksanakan dalam beberapa tahap :

- Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Tingkat Rukun Warga (RW) dilaksanakan dari tanggal 1 s/d 20 Desember 2022 bertempat di lingkungan Rukun Warga (RW) masing-masing.
- Forum Konsultasi Publik (Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan Pulutan ada beberapa tahapan :
 - Rapat Pra Musrenbang
pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2023 bertempat Ruang Rapat Kelurahan Pulutan.
 - Rapat Tim 9 LPMK
pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 bertempat Ruang Rapat Kelurahan Pulutan.
- Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan Pulutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Balai Kelurahan Pulutan.

B. Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pra Pelaksanaan

Beberapa langkah pra pelaksanaan dalam Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) :

- a Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Pembentukan tim bersama persiapan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), tim terdiri dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan. Keberadaan Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan tertuang dalam Surat Keputusan Camat Sidorejo Kota Salatiga

Nomor 050/005 tentang Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pulutan Tengah Kecamatan Sidorejo Tahun 2023;

b. Penentuan Tema Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Tema Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada tahun 2023 adalah "Mewujudkan Insan Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur".

2. Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan Pulutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 08.00 s.d selesai bertempat di Balai Kelurahan Pulutan Kota Salatiga.

Hasil Pembahasan

- Penyampaian hasil analisis rencana kegiatan yang sudah dibagi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Pembahasan umum oleh forum dan dimungkinkan adanya usulan, tambahan, koreksi yang semuanya untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan.
- Menyepakati hasil perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan keputusan kolektif dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkompeten.
- Melakukan pengesahan hasil Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) setelah diterima oleh Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

3. Pasca Pelaksanaan

Pada tahap ini Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sebagai berikut :

- a. Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan merekap dan memperbaiki redaksi maupun tata tulisan sesuai aturan yang berlaku tanpa merubah isi perencanaan.
- b. Penyusunan laporan serta pendistribusiannya kepada semua pihak yang berkepentingan
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- d. Melakukan revisi apabila ditemukan hal - hal yang mendesak perlu direvisi.
- e. Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara (terlampir)

C. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilaksanakan dalam bentuk tatap muka. Kegiatan tatap muka dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara para pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Pulutan. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah para pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Pulutan yang terdiri dari :

- Lurah Pulutan beserta staf
- Unsur Kecamatan Sidorejo
- Unsur Ketua Rukun Warga (RW) se Kelurahan Pulutan
- Unsur Ketua Rukun Warga (RT) se Kelurahan Pulutan
- Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Unsur Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Unsur Karang Taruna
- Unsur Keluarga Siaga
- Unsur PKK
- Unsur Gapoktan
- Unsur PSM
- Unsur Dinas/Instansi terkait (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

D. Susunan Acara

SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KELURAHAN PULUTAN TAHUN 2023 UNTUK USULAN TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kelurahan Pulutan

| Waktu | URAIAN | KETERANGAN |
|---------------|---|---|
| 07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 08.00 - 08.20 | Pembukaan | Pembawa Acara |
| | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Dirigen |
| | Doa | Panitia |
| 08.20 - 09.00 | Sambutan - sambutan | Lurah Pulutan |
| | | Camat Sidorejo |
| | | Anggota DPRD Dapil Sidorejo |
| | Penyampaian Materi: | |
| 09.00 - 10.15 | Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Basirin dari Anggota DPRD dari PKB |
| 10.15 - 11.15 | Pemaparan Tim Pendamping Musrenbang Tingkat Kota | Armitha Devi Latifardani, SE dari Bappeda |
| 11.15 - 12.30 | Pemaparan Sklala Prioritas Rencana Kegiatan Tahun 2024 | Lurah Pulutan |
| 12.30 - 13.00 | Ishoma | Panitia |
| 13.00 - 15.00 | Diskusi dan Tanya Jawab | Moderator: Lurah |
| 15.00 - 15.30 | Pembacaan Hasil Kesepakatan Hasil Musrenbang | Sekretaris Kelurahan |
| 15.30 - 15.45 | Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang | Panitia |
| 15.45 - 16.00 | Sesi Foto | Panitia |
| 16.00 | Penutup | Pembawa Acara |

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Identifikasi Masalah

Dari hasil proses penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dapat ditemukan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yaitu drainase dan saluran air, talud, dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
2. Permasalahan sarana dan prasarana transportasi yaitu jalan pemukiman dan jalan penghubung antar kampung dan penerangan jalan umum.
3. Permasalahan sarana dan prasarana kesehatan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, pemberantasan DBD, pengentasan stunting dan perbaikan pola asuh anak.
4. Permasalahan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu taman bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.
5. Permasalahan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan seperti keterampilan dan pengetahuan warga dan peningkatan kinerja RT, RW dan LPMK.

B. Analisis

Permasalahan kurangnya sarana untuk tiap RW dan Kelsi, prasarana lingkungan pemukiman saluran air/drainase yang kurang lancar di wilayah RW.01, 04 dan 05 menyebabkan tergenangnya air di lokasi tersebut, kondisi jalan yang kurang memadai di wilayah RW.04 dan 05, menyebabkan kurang lancarnya transportasi di wilayah tersebut, tidak adanya ruang Posyandu dan PKK di Balai RW.01 dan belum terselesaikannya pembagunan Balai RW.02 dan pagar makam RW.04

Permasalahan pemberdayaan masyarakat kurangnya ilmu dan pengetahuan untuk Bumil Resti dan Stunting, pola asuh anak, pencegahan anemia untuk remaja putri, penanganan kasus DBD dan kesehatan masyarakat. Pemberdayaan lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, meningkatkan keimanan dan keagamaan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

C. Rencana Aksi

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana lingkungan permukiman maka akan dilakukan pembangunan saluran air/drainase di wilayah RW.01, 04 dan 05 yang diharapkan akan mampu mengurangi genangan air di lokasi tersebut. Mengatasi kelancaran transportasi dilakukan kegiatan betonisasi jalan pada wilayah yang kondisi jalannya kurang memadai yaitu di wilayah RW.04 dan 05. Dilakukan pula pembangunan ruang posyandu dan PKK di Balai RW.01 dan penyelesaian Balai RW.02.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat perlu adanya penyuluhan dan pendampingan Bumil Resti dan Stunting, pola asuh anak, pencegahan anemia untuk remaja putri, penanganan kasus DBD dan Gerakan Kesehatan Masyarakat. Dilakukan expo gebyar UMKM dan Merti Deso sebagai sarana promosi produk UMKM dan kultur budaya masyarakat. Untuk meningkatkan keimanan dan keagamaan masyarakat dilaksanakan Festival Keagamaan (Lomba MTQ dan reban, takbir keliling dan saresehan keagamaan). Pelatihan LINMAS sangat diperlukan untuk kesiap siagaan anggotanya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Publik) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pulutan kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

Kami berharap penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

1. UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
KELURAHAN PULUTAN
Jl. Siwelut Nomor 1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

Salatiga, 16 Januari 2023

Nomor : 005/ 06/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musrenbang
Tk. Kelurahan Tahun 2023

Kepada
Yth.
di _

SALATIGA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pelaksanaan Musrenbang di Tk. Kelurahan Tahun 2023, maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2023
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Kantor Kelurahan Pulutan
Acara : Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2023 untuk Usulan Kegiatan di Tahun 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

LURAH PULUTAN,

CHOMSATUN,SH

Penata Tk.I

NIP. 19720118 200604 2 002

2. DAFTAR HADIR



KECAMATAN SIDOREJO KELURAHAN PULUTAN

Jl. Siwelut No.1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023 ✓
Waktu : 08.00 WIB ✓
Tempat : Balai Kelurahan Pulutan ✓
Agenda Kegiatan : Musrenbang Kelurahan Pulutan Tahun 2023 ✓

| No. | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & No. Telp | Tanda Tangan |
|-----|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Sei Hartati | Kelisi Pulutan | Rt 05 / Rw 1 080 214 356 259 | |
| 2. | A. Najih | Rt 01 | Rt 03 / Rw 05 | |
| 3. | Ropi | Kelisi | Rt 03 102 | |
| 4. | SUMARDI | Rw 01 | PULUTAN R-3 | |
| 5. | NUKAMTO | RT 04 RW 1 | PULUTAN | |
| 6. | SHOLIH | Rw 5 | Rw 05 | |
| 7. | ARUN. A. | PKK RW | Rw 05 | |
| 8. | B. JUMARIS | Yama | Rt 01 | |
| 9. | Ajiyah | Kelisi | Rt 2/1 | |
| 10. | NASIKUN | RT. 01 | RT. 01 / RW | |
| 11. | Erkus Muhammad | Rt 02 / 04 (kat) | Rt 02 / 04 | |
| 12. | Nurkholis | Rt 03 / 04 | Rt 03 / 04 | |
| 13. | Selman | Rt 01 / 04 | Rt 01 / 04 | |
| 14. | NOR ARWID | RT 01 / 04 | RT 01 / 04 | |
| 15. | ASYKUR | RT 03 / 02 | RT 03 RW 02 | |
| 16. | AS-adi R. | RT 01 / 03 | RT 01 / 03 | |
| 17. | KURNIA S | RT 01 / 04 | Rt 01 / 04 | |
| 18. | Mahlesmi | Rw 03 | Rw 03 | |
| 19. | Komandi | Rw 2 | Rw 2 | |
| 20. | Nur anis | Rt 02 / 05 | Rt 02 | |

TELAH DIPERIKSA
PKK - SKPD
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA
TANGGA: 28/1/23
0



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
KELURAHAN PULUTAN

Jl. Siwelut No.1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG
KELURAHAN TAHUN 2023

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Balai Kelurahan Pulutan
Agenda Kegiatan : Musrenbang Kelurahan Pulutan Tahun 2023

| No. | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & No. Telp | Tanda Tangan |
|-----|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 41. | Komariyah | PKK - Kelurahan | Pulutan lor 1/2 | 41. |
| 42. | Masrukah | PKK RW 02 | Pulutan 3/2 | 42. |
| 43. | Anisa Anwar Sani | PKK Kelurahan | Pulutan 3/3 | 43. |
| 44. | Eko Seto Budi | RT 01/01 | RT 01/01 | 44. |
| 45. | Rustanto | Bahubankhima | PKS Sidorejo | 45. |
| 46. | Anur | Babinsa | Koramil 01 | 46. |
| 47. | Kus Santari | Kec Sidorejo | Kecamatan | 47. |
| 48. | Priyanto | RT 3 / RW 1 | Pulutan | 48. |
| 49. | M. Jabri | RT 1 / RW 2 | Pulutan | 49. |
| 50. | Muhrihan | RT 2 / RW 2 | Pulutan | 50. |
| 51. | Teguh Purbadi | RT 4 / RW 2 | Pulutan | 51. |
| 52. | Amir Hidayat | RT 3 / RW 3 | Pulutan Lor | 52. |
| 53. | Dana | RW 4 | RW 4 | 53. |
| 54. | Darigati | RW 1 | RW 1 | 54. |
| 55. | Yusuzain | RW 3 | RW 3 | 55. |
| 56. | Rupiyatien | RW 1 | RW 1 | 56. |
| 57. | Hani | LPMK | RW 1 | 57. |
| 58. | Kadarwati | RW 2 | RW 2 | 58. |
| 59. | Teguh | Karang Tarum | RW 4 | 59. |
| 60. | Tara Hana | RW 2 | RW 2 | 60. |

ST. TELUK DI PERIKSA
MPK - SKPD
KECAMATAN SIDOREJO
KELURAHAN PULUTAN
KOTA SALATIGA
TANGGAL 18 JANUARI 2023
PARAF:
LURAH PULUTAN
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
KELURAHAN PULUTAN

Jl. Siwelut No.1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG
KELURAHAN TAHUN 2023

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Balai Kelurahan Pulutan
Agenda Kegiatan : Musrenbang Kelurahan Pulutan Tahun 2023

| No. | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & No. Telp | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 21. | Putri Vidya Adhania | Karang Taruna | Pulutan rw 2 | 21. |
| 22. | Aulia Novka | Karang Taruna | Pulutan RW 2 | 22. |
| 23. | Muh. Atiqudin | RT 01/05 | RT 01/05 | 23. |
| 24. | Nilang sofya | Karang Taruna | Pulutan RW 03 | 24. |
| 25. | Muhammad Iqbal Lu'Am | Karang Taruna | Pulutan RW 2 | 25. |
| 26. | Dzikroni | RT 02/03 | Pulutan RT 02/03 | 26. |
| 27. | RUMYATI | RT 05/01 PKK | RT 05/01 | 27. |
| 28. | PURWOMI | RT 5/01 | RT 5/01 | 28. |
| 29. | Fuad Kurniawan | RT. 01/04 | Pulutan RT. 01/04 | 29. |
| 30. | Mawazuis | RT. 03/01 | Pulutan Kidul | 30. |
| 31. | Firda K. | TP. PKK | Kel. Pulutan | 31. |
| 32. | Rokhinah | RT 03/04 | Pulutan | 32. |
| 33. | Umi Kholifah | RT 03/04 | - - | 33. |
| 34. | Sri Surarni | RT 04/05 | - - | 34. |
| 35. | Nadaniyah | RT 01/02 | Pulutan | 35. |
| 36. | Sadig | RT 02/01 | Pulutan | 36. |
| 37. | SHOLEKAH | RT 02/04 | pulutan rw 04 | 37. |
| 38. | Mawazuis | RW 02 | Pulutan | 38. |
| 39. | Stovani | | Sidorejo | 39. |
| 40. | mulozani | RT 05/05 | kel. pulutan | 40. |

TELEP. SIPERIKSA
FKK - SKPD
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
KELURAHAN PULUTAN
 Jl. Siwelut No.1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG
KELURAHAN TAHUN 2023

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023 ✓
 Waktu : 08.00 WIB ✓
 Tempat : Balai Kelurahan Pulutan
 Agenda Kegiatan : Musrenbang Kelurahan Pulutan Tahun 2023

| No. | Nama | Lembaga/Instansi* | Alamat & No. Telp | Tanda Tangan |
|-----|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Sri Takwini, S.P. H.P. | Dinas Pendidikan | Salatiga. 08882551748 | 1. |
| 2. | dr. Tasfyal A.P. | DCC | Salatiga, 085777858483 | 2. |
| 3. | Edward | Bappeda | Surocode 51 | 3. |
| 4. | Sapti Anggi P | Bappeda | Salatiga, 085743074597 | 4. |
| 5. | Nungki K | Bappeda | Salatiga, 081 63 880 837 | 5. |
| 6. | Reni | BPKPD | | 6. |
| 7. | Marhasi | " | | 7. |
| 8. | Bambang | " | | 8. |
| 9. | Jumuspikha | Dipura | | 9. |
| 10. | Rena Y. I. | " | | 10. |
| 11. | P. Bimo W | " | | 11. |
| 12. | Sri Wihartanti | Dispanra | | 12. |
| 13. | Istiana N. A | Dispanngan | Salatiga, 085225283353 | 13. |
| 14. | | Dispanngan | | 14. |
| 15. | | KPUS | | 15. |
| 16. | Rita W | Bakesbangpol | Salatiga | 16. |
| 17. | Yuni A | " | " | 17. |
| 18. | Asmi Haris R. | Dispanngan | Salatiga | 18. |
| 19. | Sutini | Dinar Sosial | 085225321801 | 19. |
| 20. | Agung P | Kec. Rejo | 081 325 911 400 | 20. |

TELAH DIPERIKSA
 17.
 KEPALA SKPD
 KECAMATAN SIDOREJO
 KOTA SALATIGA
 TANGGAL: 18 JAN 2023
 PARAF:

* PEMERINTAH KOTA SALATIGA
 LURAH PULUTAN
 KECAMATAN SIDOREJO
 PULUTAN
 KOTA SALATIGA

4

3. NOTULEN



PEMERINTAH KOTA SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO KELURAHAN PULUTAN

Jalan Siwelut Nomor 1 Salatiga Kode Pos 50716 Telp. (0298) 314816

NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN MUSRENBANG KELURAHAN PULUTAN

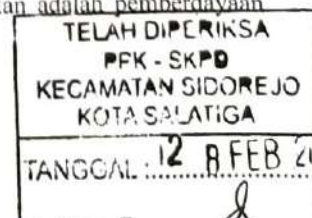
Hari Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023 ✓
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB ✓
Tempat : Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Pulutan
Agenda Rapat : Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pulutan

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Sambutan Lurah Pulutan dilanjutkan Paparan

- Ucapan selamat datang dan terima kasih pada Dapil Sidorejo dan peserta tamu undangan yang hadir baik dari Ketua RW, Pokmas, dan Dinas / OPD yang terkait.
- Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, dan limpahan rahmat kita bisa berkumpul di forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 pada pagi hari ini. Semoga semua pinaringan sehat dan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya Robbal Alamin.
- Syukur Alkhamdullah Para Undangan Musrenbang sebagian besar sudah bisa hadir semua geh khususnya Pengarusutamaan respinsif Gender dan kami berharap apa yang sudah menjadi kesepakatan Pra Musrenbang yang sudah dilaksanakan tanggal 5 Januari 2023 bisa menjadikan Skala Prioritas di Musrenbang pada pagi hari ini.
- O iya saya ingatkan lagi untuk selayang panadang kegiatan di Tahun 2022 yang sudah dilaksanakan kami berharap untuk bangunan- bangunan seperti Taman RW, Taman Bermain, Taman Baca atau yang lain bisa di jaga, di rawat, dan dibersihkan dengan baik, jangan sampai apa yang sudah diajukan masyarakat tidak hanya muspro saja melainkan bisa selaras dengan apa yang sudah diusulkan sejak pertama kalinya.

4. Sambutan Camat Sidorejo

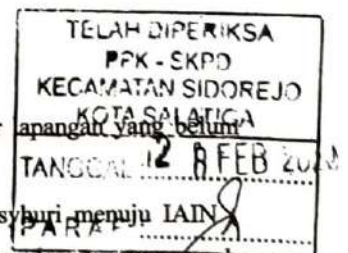
- Diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga usulan fisik maupun non fisik dapat seimbang dan dapat terserap dalam pembangunan masyarakat, apalagi untuk usulan kegiatan di tahun 2024 yang diutamakan adalah pemberdayaan masyarakat di wilayah
- Dalam usulan ini akan di rumuskan :
 - a. Diajukan untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024



- b. Adanya Musrenbangkel yang dihadiri oleh perwakilan dari warga dan tokoh masyarakat ini dilaksanakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat mengenai perencanaan dan pembangunan yang nantinya dapat terealisasi di Kelurahan Pulutan.
 - c. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi usulan dari masyarakat bisa terealisasi dan terserap dengan baik.
5. Sambutan Bapelitbangda Kota Salatiga oleh Ibu Armitha Devi Latifardani, SE
- Untuk tema pembangunan 2024, mewujudkan insan yang sehat dan cerdas menuju Salatiga yang bersih, sehat, dan berilmu serta berbudi luhur.
 - Prioritas untuk Pembangunan 2024 itu bisa di lihat dari :
 - a. Peningkatan kualitas sekolah
 - b. Peningkatan Peran dan kompetensi guru
 - c. Peningkatan peran orang tua
 - d. Edukasi pelestarian budaya
 - e. Peningkatan aktivitas seni budaya
 - f. Kualitas layanan ibu pasca melahirkan
 - g. Penurunan gizi buruk, stunting, wasting, underweight dan obesitas
 - h. Penegndalian penambahan penduduk
 - i. Peningkatan kesejahteraan sosial kolaborasi mengatasi PMKS
 - j. Peningkatan infrastruktur dasar dan berujung
 - Alokasi Pagu Dakel dan Proporsi Permas : Pagu dakel 2024 diperhitungkan dari alokasi dakel 2023 setelah dikurangi insentif RT/RW/LPMK dengan formulasi:
 - Jika pagu permas < 5 % maka di harapkan ada kenaikan 15 %
 - Jika pagu permas 5 % - 10 % maka diharapkan ada kenaikan sebesar 10 %
 - Jika pagu permas > 10 % maka diharapkan ada kenaikan sebesar 5 %
 - Pagu Indikatif Alokasi Anggaran Tahun 2024 untuk Kelurahan Pulutan adalah :
Rp. 963.900.000,-
 - Kami berharap untuk Musrenbang Tahun ini bisa terlaksana semua apa yang menjadi Skala Prioritas.

6. Tanya Jawab

- a. Dari Peserta Nama Pak Mawardi Ketua RW 2
 - Bertanya : - adanya tumpukan material dari dinas sekitar perumahan yang belum diratakan atau dirapikan
 - Belum adanya LPJU sebelah barat Pak Asyuri menuju IAIN (belum ada realisasi) bisa diganti dengan lampu yang agak terang/putih
 - Adanya Jalan Ambrol sebelah selatan Masjid
 - Depan Balai RW aset bengkok bisa dialokasikan untuk pos PAUD



- Jawaban : - Untuk perihal itu kewenangan ada di Dinas terkait yaitu Dispora, Nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait
- Dari DLH memberikan jawaban memang penting penerangan jalan karena untuk keselamatan dan juga bisa membawa dampak negatif.
- Dari DPUPR : Usulan untuk jalan ambrol (jl. Dipomenggolo), karena taludnya/ perlu peningkatan talud jalan kanan dan kiri, untuk dimasukkan ke usulan dinas saja, untuk informasi bisa kepada kasi ekbang disertai foto-foto kerusakan & lokasinya
- Dari Bu Lurah, pada saat ra mjsrenbang usulan yang dimaksud sebenarnya masuk di tanah sebelah kiri sebelum rumah mbah bastari, untuk pembuatan PAUD harus ijin dulu ke Dinas Pendidikan sebagai pengampu, apakah PAUD tersebut sudah beroperasi apa belum, kemudian di kelola oleh masyarakat atau yayasan, jadi untuk kepengurusan pembuatan PAUD sebelum di bangun harus jelas dulu asal dan usulnya.

b. Dari peserta Nama : Pak Sholli (Ketua RW 5)

Bertanya : - Apakah tanah bengkok blotongan /pulutan bisa digunakan untuk balai RW? Secara regulasi apakah bisa dikerjakan?

- Adanya talud/pondasi jebol , yang kolam lele resah
- Di RW 5 membutuhkan alat bantu difable dari Dinsos, pengusulannya Kursi Roda

Jawaban : - Dari Sekretaris BPKPD bisa dilihat status sawah/pekarangan, kalau sawah tidak boleh, kemudian di buat berita acara untuk tanahnya dari Kel. Blotongan ke Kel. Pulutan

- Untuk talud jebol insyaallah akan di realisasikan di tahun 2023 karena juga sudah di survey oleh DPUPR

c. Dari Peserta Nama : Tina Kurlina (PKK)

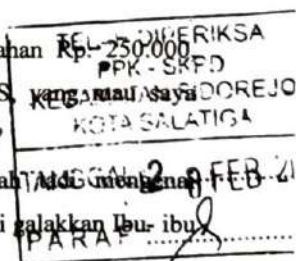
Bertanya : - Tentang Insentif RT/RW/LPMK, ada penambahan Rp. 250.000, penambahan ini akan dianggarkan untuk BPJS, yang mau saya tanyakan kenapa kader PKK tidak mendapatkan?

- Untuk melanjutkan pernyataan dari Bu Lurah, ada mengenai kebersihan dan perawatan Taman RW akan kami galakkan bu-ibu PKK

Jawaban : - Dari Pak Camat, pengajuan untuk nota dinas masalah insentif PKK mudah-mudahan bisa di ACC yang akan disesuaikan di Tahun 2024.

d. Dari Peserta Nama : Sumardi Ketua RW 1

Bertanya : - Pada saat pelatihan linmas di Banyumili, banyak yang antusias, saya mewakili teman-teman di Linmas ingin sekali menyampaikan perihal



linmas seragamnya sudah tidak layak dipakai, atau sudah tidak muat, yang mau saya tanyakan apakah bisa untuk pengadaan seragam yang baru ?terima kasih

Jawaban : - Menunggu Permendagri Kebutuhan Linmas rencana seragam akan diganti dengan yang baru karena juga akan mendekati PEMILU mudah-mudahan bisa tercover di pengajuan nanti.


e. Dari Peserta Nama : Muhlisin Ketua RW 3

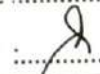
Bertanya : - Pertanyaannya sudah beberapa kali kami mengusulkan sumur bor tapi belum di tindak lanjuti mengingat sudah terlalu padat penduduk, saat ini warga menggunakan air sumur takutnya sumur tercemar karena digunakan utk kebutuhan sehari- hari dan bukan PDAM. Kami mohon untuk di tindak lanjuti kepada OPD terkait. Terima kasih.

Jawaban : - Dari DPUPR kebetulan yang datang adalah Mas Supri, beliau menuturkan bahwasannya dalam pembuatan sumur bor itu harus ada persyaratannya, diantaranya: Lokasinya, Status Tanahnya tidak dalam sengketa, adanya Surat Pernyataan untuk digunakan masyarakat (kesepakatan bahwasannya akan di bangun sumur bor) kenapa? Supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari.

7. Pembacaan Kesepakatan Hasil Musrenbang oleh Lurah Kelurahan Pulutan
8. Penandatanganan Berita Acara oleh Perwakilan Masyarakat dan Kelompok Organisasi Masyarakat
9. Penutup

Salatiga, 18 Januari 2023 ✓
Kasi Ekbang Kelurahan Pulutan


Danis Wahyu Fitriani
NIP. 19850622201004 2 002

| |
|---|
| TELAH DIPERIKSA PPK - SKPD KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA |
| TANGGAL 12 FEB 2023 |
| PARAF  |

4. BERITA ACARA

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG
DI KELURAHAN PULUTAN TAHUN 2023
NOMOR : 410/01/602.4**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Balai Kelurahan Pulutan telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk usulan kegiatan di Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh :
 - Anggota DPRD Dapil Sidorejo
 - Lurah Pulutan
 - Camat Sidorejo
 - Kepala Bappeda Kota Salatiga yang diwakili oleh Kabid Perencanaan Kesra (Ibu Armitha Devi Latifardani,SE)
2. Pemaparan materi usulan musrenbang oleh Lurah Pulutan
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh Lurah Pulutan dan masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang Kelurahan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Jam : 08.00 – 14.00 WIB

Tempat : Balai Kelurahan Pulutan

Musrenbang Kelurahan : Pulutan

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2024 serta daftar Pelaksana Swakelola Tipe I/III/IV kegiatan-kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II dan LAMPIRAN III berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir dalam rancangan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023 dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT** : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024

I

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 18 Januari 2023

Pimpinan Sidang
LURAH PULUTAN



CHOMSATUN,SH

Penata Tk.I

NIP. 19720118 200604 2 002

Mewakili Peserta Musrenbang Kelurahan Pulutan :

| No. | Nama | Jabatan/Lembaga/Instansi | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1. | Chomsatun, SH | Lurah | Kelurahan Pulutan | 1.  |
| 2. | Danis Wahyu.F, SE | Kasi Ekbang | Kelurahan Pulutan | 2.  |
| 3. | Tina Kurlina | TP. PKK Kelurahan | RT 01,RW 01 | 3.  |
| 4. | Hanif, S.Pdi | Ketua LPMK | RT 05,RW 01 | 4.  |
| 5. | Sholli, SE | Ketua RW 05 | RT 01,RW 05 | 5.  |
| 6. | Mawardi,SE | Ketua RW 02 | RT 02,RW 02 | 6.  |
| 7. | Rofi'i | Ketua Kelsi | RT 03,RW 02 | 7.  |
| 8. | Kurnia Setyawan | Ketua Karang Taruna | RT 01, RW 04 | 8.  |

II

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERUBAHAN KEGIATAN
KELURAHAN PULUTAN KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA
TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga , kami Lurah beserta perangkat kelurahan dan LPMK Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo, telah mengadakan musyawarah dan menyepakati usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024 sebagai berikut :

| USULAN KEGIATAN | LOKASI | PAGU (Rp) | SUMBER DANA | METODE PELAKSANAAN |
|---|----------|------------------|-------------|--------------------|
| PEMBANGUNAN SARPRAS KELURAHAN | | | | |
| D. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | 4.320.000 | APBD | |
| 2. PPTK | | 4.320.000 | | |
| E. Belanja Barang Habis Pakai | | 2.280.000 | | |
| 1. Kertas HVS | | 360.000 | | |
| 2. Pengandaan & Penjilidan + Cetak Cover Tipis | | 1.920.000 | | |
| 3. Belanja Makan dan Minum Rapat | | 1.400.000 | | |
| 1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sarpras (Kudapan Snack 10 org x 14 kali x 10.000) | | | | |
| J U M L A H (I) | | 8.000.000 | | |
| PEMBANGUNAN SARPRAS | | | | |
| Pembangunan Ruang Posyandu, Ruang PKK di dalam Balai RW | RW 1 — | 50.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase | RW 1 ~ | 45.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembangunan Balai RW Lanjutan | RW 2 — | 40.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembangunan Pagar Mega Mendung | RW 4 | 60.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase (Ketinggen Timur) | RW 4 — | 30.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Betonisasi di Jl. Ketinggen | RW 4 ~ | 30.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase | RW 5 — | 25.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Betonisasi Jl. Makhasin | RW 5 — | 60.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase di Jl. Kenteng | RW 5 — | 25.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase sebelah Masjid Baitush Solikhin | RW 5 — | 25.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pembuatan Saluran Drainase (Ketinggen Barat | RW 4 — | 25.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 4 |
| Pengadaan Tenda uk. 4x5 | RW 1,2,5 | 20.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |

III

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|
| 3. | Pengadaan Sound System Portable | RW 1,2,3,4 | 12.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 4. | Pengadaan Kursi | RW 1,2,5 | 27.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 5. | Pengadaan Alat Olah Raga (Tenis Meja, Bola Sepak, Bola Volly) | RW 1,3,4 | 20.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 6. | Pengadaan CCTV | RW 2,3 | 20.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 7. | Pengadaan Cermin Cembung | RW 3,5 | 20.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 8. | Pengadaan Mesin Potong Rumput | RW 1,2 | 10.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 9. | Pengadaan Sarpras Posbindu | RW 2 | 12.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 10. | Pengadaan Alat Rebana | RW 1,4,5 | 15.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 11. | Pengadaan Tempat Sampah | Kelsi | 6.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 12. | Pengadaan Sarpras Grebeg Jentik | Kelsi | 5.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 13. | Pengadaan Komputer, Printer, Meja, Lemari Arsip | Kelsi | 15.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| J U M L A H (II) | | | 597.000.000 | | |
| II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1. | Kegiatan Festival Keagamaan (MTQ, Rebana, & Takbir Keliling) | Kelurahan Pulutan | 62.826.000 <i>43.698.000</i> | APBD | Swakelola Tipe 1 <i>19.128.000</i> |
| 2. | Gebyar UMKM Tk. Kelurahan | Kelurahan Pulutan | 50.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 3. | Festival Budaya (Merti Desa) Tk. Kelurahan | Kelurahan Pulutan | 50.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 4. | Sarasehan Keagamaan | Kelurahan Pulutan | 15.796.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 5. | Gernas Tk. Kelurahan | Kelurahan Pulutan | 30.000.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 6. | Workshop DBD | Kelurahan Pulutan | 6.896.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 7. | Sosialisasi Pencegahan Anemia Remaja Putri | Kelurahan Pulutan | 7.846.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 8. | Penyuluhan Pola Asuh Anak | Kelurahan Pulutan | 6.446.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 9. | Pembinaan Administrasi PKK | Kelurahan Pulutan | 8.906.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 10. | Pendampingan Bumil Resti & Stunting (Bagi Kader) | Kelurahan Pulutan | 11.810.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 11. | Penyuluhan Bumil Resti dan Stunting | Kelurahan Pulutan | 7.518.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 12. | Pelatihan Linmas | Kelurahan Pulutan | 15.206.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |
| 13. | * Insentif RT/RW/PKK (25 rg x 3.350.000) • Insentif LPMK (1 org x 1.900.000) | Kelurahan Pulutan | 83.750.000 1.900.000 | APBD | Swakelola Tipe 1 |

IV

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| J U M L A H (III) | 358.900.000 | | |
| J U M L A H S E L U R U H N Y A (I + II + III) | 963.900.000 | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 18 Januari 2023

Mengetahui,
 Kepala
 Kelurahan Pulutan

CHOMSATIN, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19720118 200604 2 002

Ketua

HANIF, S.Pd

✓

5. DOKUMENTASI

DOKUMENTASI MUSRENBANG TAHUN 2023 KELURAHAN PULUTAN

